

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi perekonomian negara. Bank merupakan mitra dalam memenuhi semua kebutuhan keuangan masyarakat. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, jenis perbankan berdasarkan kepemilikannya diantaranya adalah Bank milik pemerintah, Bank milik swasta nasional, Bank milik koperasi, Bank milik asing dan Bank milik campuran . Bank milik pemerintah terbagi lagi menjadi dua yaitu Bank Umum Milik Negara (BUMN) dan BPD. Pada penelitian ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian pada BPD karena penelitian pada BUMN sudah banyak dilakukan sebelumnya.

BPD adalah bank umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi di berbagai daerah. Adanya BPD didasarkan pada Undang-undang No.13 Tahun 1962. Fungsi BPD yang paling utama yaitu menopang program pemerintah dalam membangun daerahnya masing-masing. Hal yang dilakukan BPD untuk mendukung program pemerintah daerah dilakukan dengan cara menyimpan kas pemerintah daerah, menghimpun dana dari masyarakat dan membantu menggerakkan ekonomi di daerah. Sampai saat ini ada 26 BPD yang melayani hampir di setiap wilayah Indonesia. Daftar BPD tersebut diantaranya BPD Aceh, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung,

BPD Bengkulu, BPD Sumatera Barat, BPD Lampung, BPD Jambi, BPD Riau Kepri, BPD DKI, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Jawa Tengah, BPD Yogyakarta, BPD Jawa Timur, BPD Bali, BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Kalimantan Selatan, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Timur, BPD Sulawesi Utara, BPD Sulawesi Tengah, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, BPD Maluku dan BPD Papua (Ojk.go.id). Walaupun beroperasi dan memiliki titik fokus di wilayah yang berbeda, seluruh BPD harus bekerjasama dalam mendukung pertumbuhan satu dan yang lainnya agar bisa bertahan dalam industri perbankan.

Tabel 1.1

Jumlah Pertumbuhan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia

Keterangan	Jumlah (dalam Miliar)			Pertumbuhan 2014 – 2015 (dalam %)	Pertumbuhan 2015 – 2016 (dalam %)
	2014	2015	2016		
Total Aset	440,691	475,696	529,746	0,79	11,36
Total Kredit	301,456	357,859	328,759	0,90	0,88
Total DPK	335,957	356,600	383,531	0,61	0,75

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Tahun 2014-2016

Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Indonesia, kinerja BPD cukup baik walaupun belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Total aset BPD pada Desember 2016 tergolong cukup tinggi yaitu 529,746 miliar, meningkat dari tahun 2015 sebesar 475,696 atau 11,36 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya total dana pihak ketiga (DPK) sebesar 383,531 miliar dari 356,600 miliar atau 0,75 persen. Pertumbuhan kredit yaitu 328,759 miliar, namun jumlah ini menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 359,859

miliar atau sebesar 0,88%. Menurut Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA), porsi kredit produktif cenderung kecil yaitu sebesar 29 persen. Saat ini kredit BPD masih pada sektor kredit konsumtif.

Salah satu strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung pertumbuhan BPD yaitu dengan mencanangkan program pemerataan pembangunan daerah melalui BPD. Mulai masa pemerintahan tahun 2014 sampai pada tahun 2016, Jokowi banyak menyalurkan dana melalui Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk pembangunan daerah masing-masing, tetapi pada kenyataannya sampai pada akhir bulan April 2016 masih banyak dana daerah yang tersimpan di BPD yaitu sebesar 220 triliun. BPD hanya mengumpulkan DPK tanpa memperhatikan penyaluran kredit atau pembiayaan bagi pengusaha kecil. Jokowi menyebutkan ada beberapa pemda yang memarkirkan dananya di bank diantaranya kabupaten Tangerang sebesar 34 persen, kabupaten Jember sebesar 36 persen, kota Tangerang sebesar 32 persen, kota Kutoarjo sebesar 31 persen dan beberapa daerah lainnya yang tidak disebutkan. Dana yang tidak disalurkan tersebut akan mengganggu pertumbuhan perekonomian, karena dana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dalam rangka realisasi pembangunan daerah (Kompas.com).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selain permasalahan di atas, BPD memiliki tiga permasalahan mendasar. Permasalahan pertama dilihat dari kontribusi terhadap pemda yang tercermin dari relatif kecilnya pangsa kredit produktif yaitu sebesar 29 persen sampai pada tahun 2016. Permasalahan kedua adalah tata kelola, sumber daya manusia, manajemen risiko dan infrastruktur yang belum memadai yang memicu peningkatan kredit bermasalah. Permasalahan

ketiga terletak pada daya saing BPD yang masih rendah karena produk dan mutu pelayanan belum memadai. BPD diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut secara perlahan sehingga dapat bertumbuh dan mempertahankan kesehatannya. Jika BPD terus bertumbuh dan mempertahankan kesehatannya, BPD akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi daerah.

Kesehatan bank dapat dilihat dari baik buruknya kinerja suatu bank. Bank yang memiliki kinerja yang baik atau dalam kondisi sehat akan menarik masyarakat dan investor untuk menanamkan uangnya pada bank tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Bank wajib menjaga kesehatannya dan melaporkannya pada OJK yang berfungsi sebagai badan pengawas kesehatan bank. Sehat atau tidaknya suatu bank dapat dilihat dan dievaluasi dari laporan keuangan bank. Analisis laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, pemerintah, nasabah dan semua pihak terkait untuk menilai tingkat kesehatan bank tersebut.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor.04/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, seluruh bank umum harus menggunakan pedoman penilaian tingkat kesehatan bank yang terbaru dengan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Pedoman tata cara tersebut dikenal dengan metode RGEC, yang terdiri dari *Risk profile* (profil risiko) merupakan penilaian terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas. Faktor kedua adalah tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara para *Stakeholders* demi tercapainya tujuan perusahaan. Faktor ketiga adalah *Earnings* (rentabilitas) merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari

modal yang diinvestasikan dalam total aktiva. Terakhir adalah faktor *Capital* (permodalan) menunjukkan besarnya jumlah modal minimum yang dibutuhkan untuk dapat menutupi resiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aset-aset yang mengandung resiko serta membiayai seluruh aset tetap dan inventaris bank.

Penelitian analisis kesehatan bank sudah pernah dilakukan sebelumnya. Yang menjadi peneliti acuan dalam penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Tuti (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2012-2014 aspek RGEC Bank Umum BUMN secara keseluruhan berturut-turut berada dalam peringkat komposit 1 atau sangat sehat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tambuwun (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio CAR, KAP, ROA dan BOPO berada dalam kondisi sehat sedangkan rasio NPM dan LDR masih dikatakan kurang sehat.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, peneliti menggunakan rasio dari beberapa jurnal yang digunakan sebagai acuan penelitian ini, yaitu NPL, LDR, ROA, NIM dan CAR. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah metode dan obyeknya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat penelitian mengenai penilaian kesehatan bank dengan judul **“ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE *RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNINGS, CAPITAL (RGEC) PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) PERIODE 2014 - 2016.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pengukuran dan penilaian tingkat kesehatan BPD ditinjau dari aspek RGEC pada tahun 2014 sampai tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

Mengetahui dan mengukur penilaian tingkat kesehatan BPD ditinjau dari aspek RGEC pada tahun 2014 sampai tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan bagi pihak bank sehingga manajemen bank dapat meningkatkan kinerjanya dan dapat menetapkan strategi bisnis yang baik dalam menghadapi krisis keuangan global dan juga persaingan dalam dunia bisnis perbankan.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena menerapkan ilmu yang sudah didapat selama di kuliah sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman serta pengetahuan tentang tingkat kesehatan bank.

3. Bagi Pembaca dan Masyarakat Umum

Untuk menambah pengetahuan mengenai pentingnya analisa tingkat kesehatan bank. Dan untuk memberikan informasi tambahan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah Tingkat Kesehatan Bank.